



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SARPONO**
2. Jabatan : **DIREKTUR**
3. NHK : **761065**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 1.930.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 148 m²/100 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m²/80 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
3. Tanah Seluas 503 m² di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah Seluas 120 m² di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/42 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 9 m²/9 m² di KAB / KOTA TANGERANG, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m²/45 m² di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 219.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA 125 Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER 1.5L ULTIMATE Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000



3. MOTOR, HONDA P5E02R22M1 M/T Tahun 2016, HASIL SENDIRI
Rp. 9.000.000

4. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
25.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 3.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 39.319.891

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.191.819.891

III. HUTANG Rp. 146.200.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.045.619.891

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.